

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum harus sesuai dengan falsafah dan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang menggambarkan pandangan hidup suatu bangsa. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum sekolah diubah dan disesuaikan dengan kepentingan politik bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur bangsa sebagai cerminan masyarakat Indonesia. Pendidikan dan kurikulum di Indonesia, sejak dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan perguruan tinggi, baik formal, non formal maupun informal harus diarahkan dan disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Oleh sebab itu, para pengembang kurikulum termasuk guru harus memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang hal tersebut (Drs. Zainal Arifin, M. Pd 2012:01).

Standar dan Kompetensi dalam Pendidikan Nasional suatu yang perlu dalam dunia modern era globalisasi dewasa ini. Standar dan kompetensi dalam dunia pendidikan akan dikaji dari ideologi

pendidikan yang berorientasi kepada kapitalisme dan liberalisme. Seperti yang kita lihat Standar Kompetensi dalam Pendidikan Nasional dewasa ini telah merupakan suatu jenis keranjang terhadap Standar dan Kompetensi. Kualitas pendidikan diukur oleh Standar Kompetensi di dalam berbagai versi, demikian pula berbagai produk hukum dan peraturan telah dilahirkan dari keranjang tersebut. Tinjauan kritis terhadap kompetensi untuk meningkatkan mutu Pendidikan Nasional akhirnya akan dibawa kepada pengungkapan bahaya -bahaya yang tersembunyi di balik epistema-epistema tersebut, yaitu kemungkinan lahirnya suatu masyarakat Indonesia yang terkungkung oleh kompetensi yang statis yang secara keseluruhan berbahaya bagi tegaknya suatu masyarakat demokrasi yang kreatif dan inovatif (Peter Sacks, 2000: 12 - 13).

Pada hakikatnya disusunnya sebuah Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar di setiap jenjang pendidikan di Indonesia adalah untuk menyamaratakan kemampuan kognitif peserta didik. Namun itu bukan berarti mengenyampingkan aspek afektif dan psikomotor. Hanya saja yang lebih ditekankan adalah dominasi aspek kognitif. Standar Kompetensi berguna untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami materi yang diajarkan juga sebagai arahan atau tuntunan bagi guru dalam membawakan materi. Secara lebih terperinci hal itu dapat dilihat dalam indikator kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dengan melihat indikator, guru diharapkan bisa

memberikan pengajaran yang sesuai dengan aturan baku yang tersedia disertai seni mengajar yang menyenangkan. Akan tetapi seringkali terjadi kesenjangan antara realitas dan harapan, khususnya untuk Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Mayoritas peserta didik yang ditemui di lapangan hanya sampai pada taraf hafal terhadap materi PKn yang disampaikan oleh gurunya, padahal dalam Kompetensi Dasar saja siswa sudah dituntut untuk tidak sekedar hafal materi tetapi juga paham. Bahkan lebih jauh lagi dalam indikator kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mempelajari suatu materi, siswa harus dapat mengaplikasikan materi yang telah didapatnya dalam kehidupan.

Dalam sistem Pendidikan Nasional memiliki visi yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang Pancasila yang dimotori oleh pengembangan afektif seperti sikap, suka belajar, tahu cara belajar, rasa percaya diri, mencintai prestasi tinggi, punya etos kerja, kreatif dan produktif, serta puas akan sukses yang dicapai.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka di dalam Bab II Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sekolah berfungsi dan bertujuan sebagai berikut:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban Bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Masnur Muslich, 2007: 1 -2).

Sesuai fungsi dan tujuan di atas, guru, orang tua dan masyarakat mempunyai peranan dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan tersebut. Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan dijelaskan:

- A Sekolah dan komite sekolah, atau Madrasah atau komite Madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar Kurikulum dan Standar Kompetensi lulusan dibawah supervise Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap pendidikan untuk SMP, SMA dan SMK, serta Departemen yang menangani urusan pemerintah dibidang agama untuk MI, MTs, MA dan MAK (pasal 17 ayat 2).
- B Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar (pasal 20).

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan, Meliputi menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa, Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah, Menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah.
- 2) Membiasakan tertib di rumah dan di sekolah, Meliputi Menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah, Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah.
- 3) Menerapkan hak anak di rumah dan di sekolah, Meliputi : Menjelaskan hak anak untuk bermain, belajar dengan gembira dan didengar pendapatnya, melaksanakan hak anak di rumah dan di sekolah.
- 4) Menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah, Meliputi : Mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah, Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat.
- 5) Membiasakan hidup bergotong royong, Meliputi Mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong, melaksanakan hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong di rumah dan di sekolah.
- 6) Menampilkan sikap cinta lingkungan, Meliputi

Mengenal pentingnya lingkungan alam seperti dunia tumbuhan dan dunia hewan, Melaksanakan pemeliharaan lingkungan alam.

- 7) Menampilkan sikap demokratis, Meliputi Mengenal kegiatan bermusyawarah, Menghargai suara terbanyak (Mayoritas), Menampilkan sikap mau menerima kekalahan.
- 8) Menampilkan nilai-nilai pancasila, Meliputi: Mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan, dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari.
- 9) Mengamalkan makna sumpah pemuda, Meliputi Mengenal makna satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, mengamalkan nilai-nilai Sumpah pemuda dalam kehidupan sehari-hari.
- 10) Melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat, Meliputi : Mengenal aturan-aturan yang berlaku di masyarakat sekitar, Menyebut contoh-contoh aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar, Melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat sekitar.
- 11) Memiliki harga diri sebagai individu, Meliputi : Mengenal pentingnya memiliki harga diri, Memberikan contoh bentuk harga diri, seperti menghargai diri sendiri,

mengakui kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan lain lain,
Menampilkan perilaku yang mencerminkan harga
diri.

- 12) Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia,
Meliputi Mengenal kekhasan bangsa Indonesia, seperti
kebhinekaan, kekayaan alam, keramah tamahan,
Menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia.
- 13) Memahami system pemerintahan desa dan pemerintahan
kecamatan, Meliputi : Mengenal lembaga-lembaga dalam
susunan pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan,
Menggambarkan struktur organisasi pemerintahan desa dan
pemerintahan kecamatan.
- 14) Memahami system pemerintahan kabupaten, kota, dan
provinsi, Meliputi : Mengenal lembaga-lembaga dalam
susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi,
Menggambarkan struktur organisasi kabupaten, kota, dan
provinsi.
- 15) Mengenal system pemerintahan tingkat pusat, Meliputi
Mengenal lembaga-lembaga Negara dalam susunan
pemerintahan tingkat pusat, seperti MPR, DPR, Presiden,
MA, MK, dan BPK dll, Menyebutkan organisasi
pemerintahan tingkat pusat, seperti Presiden, Wakil Presiden
dan para Menteri.

- 16) Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungan, Meliputi : Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya, Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan International, Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya.
- 17) Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Meliputi : Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Menjelaskan pentingnya keutuhan NKRI, Menunjukkan contoh perilaku dalam menjaga keutuhan NKRI.
- 18) Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, Meliputi : Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, Memberikan contoh peraturan perundang - undangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas, larangan merokok.
- 19) Memahami kebebasan berorganisasi, Meliputi Mendeskripsikan pengertian organisasi, Menyebut contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat, Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi sekolah.
- 20) Menghargai keputusan bersama, Meliputi : Mengenal

bentuk-bentuk keputusan bersama, Mematuhi keputusan bersama.

D. Menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar Dasar Negara, Menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara, Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam kehidupan sehari-hari.

E. Memahami system pemerintahan Republik Indonesia, Meliputi : Menjelaskan proses pemilu dan pilkada, Mendeskripsikan lembaga-lembaga Negara sesuai UUD 1945 hasil amandemen, Mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah.

F. Memahami peran Indonesia dalam lingkungan Negara - negara di Asia Tenggara, Meliputi : Menjelaskan pengertian kerja sama Negara-negara Asia Tenggara, Memberikan contoh peran Indonesia dalam lingkungan Negara-negara di Asia Tenggara.

G. Memahami peranan politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi, Meliputi : Menjelaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, Memberikan contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan International.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi Warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kedudukan pelaksanaan pembelajaran PKn juga sangat ditentukan oleh adanya faktor sebagai berikut di atas. Pendidikan kewarganegaraan memuat konsep-konsep yang selama ini ada kesan bahwa pengajaran pendidikan kewarganegaraan itu hanya mengajar, bercerita, dan mencatat yang menyebabkan siswa bosan dan tidak aktif dalam mempelajari setiap materi pelajaran, maka dengan media yang tetap akan merubah pola pikir dan mendengar kriteria ke arah analisis dan pengamatan terhadap faktor sosial masyarakat.

Dari uraian di atas dan realita yang terjadi di MI Muhammadiyah 10 Yanggong Ponorogo, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Kritis Terhadap Kompetensi Mata Pelajaran PKn di MI Muhammadiyah 10 Yanggong Ponorogo Tahun Pelajaran 2012/2013”.

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat Tatar belakang yang ada dan agar dalam, penelitian ini tidak terjadi kerancuan, maka penulis dapat membatasi dan merumuskan permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini.

Adapun Rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Mata Pelajaran PKn di MI Muhammadiyah 10 Yanggong Ponorogo Tahun Pelajaran 2012 / 2013?
2. Apakah perlu revisi terhadap Kompetensi Mata Pelajaran PKn di MI Muhammadiyah 10 Yanggong Ponorogo Tahun Pelajaran 2012 / 2013?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Tatar belakang dan rumusan masalah, peneliti menentukan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kompetensi Mata Pelajaran, PKn di MI Muhammadiyah 10 Yanggong Ponorogo Tahun Pelajaran 2012 / 2013.
2. Untuk mengetahui perlu tidaknya revisi Kompetensi Mata Pelajaran PKn di MI Muhammadiyah 10 Yanggong Ponorogo Tahun Pelajaran 2012 / 2013.

A Landasan Teori

Pengertian kompetensi oleh beberapa ahli memberikan definisi secara berbeda-beda. Persoalan kebutuhan untuk memperoleh sumber daya manusia unggul dan profesional sangat diharapkan oleh banyak perusahaan. Persoalan yang dimaksud dalam konteks ini ialah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi merujuk kepada

pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau karakteristik kepribadian individual yang secara langsung mempengaruhi kinerja seseorang.

Menurut Mc Acshan dalam Sutrisno (2010: 203) memberikan pengertian “kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik -baiknya”. Apabila kompetensi diartikan sama dengan kemampuan, maka dapat diartikan pengetahuan memahami tujuan bekerja, pengetahuan dalam melaksanakan kiat -kiat jitu dalam melaksanakan pekerjaan yang tepat dan baik, serta memahami betapa pentingnya disiplin dalam organisasi agar semua aturan dapat berjalan dengan baik.

Peter F Drucker (1985: 130) menambahkan tentang “kompetensi tersebut bahwa bagian terpenting dari Kompetensi adalah kemampuan berinovasi secara terus menerus dan hal tersebut memiliki andil besar pada keberhasilan”. Berdasarkan dari definisi ini, maka beberapa makna yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- F. Karakteristik dasar (*underlying characteristic*), kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai perilaku yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan.
- G. Hubungan kausal (*causally related*), berarti kompetensi

dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksikan kinerja seseorang, artinya jika mempunyai kompetensi yang tinggi, maka akan mempunyai kinerja yang tinggi pula (sebagai akibat).

- 3) Kriteria (criterion referenced), yang dijadikan sebagai acuan, bahwa kompetensi secara nyata akan memprediksikan seseorang dapat bekerja dengan baik, harus terukur dan spesifik atau terstandar.

Hal ini memberikan penjelasan bahwa kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu. Dari karakteristik dasar tersebut tampak tujuan penentuan tingkat Kompetensi atau Standar Kompetensi yang dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan dan mengategorikan tingkat tinggi atau di bawah rata-rata.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat terdiri dari Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk

menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

- 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, serta anti-korupsi.
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan Bangsa -bangsa lainnya.
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pendidikan adalah suatu proses enkulturasi, berfungsi

mewariskan nilai-nilai dan prestasi masa lalu ke generasi mendatang. Nilai-nilai dan prestasi itu merupakan kebanggaan Bangsa dan menjadikan Bangsa itu dikenal oleh Bangsa-bangsa lain. Selain mewariskan, pendidikan juga memiliki fungsi untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan prestasi masa lalu itu menjadi nilai -nilai budaya Bangsa yang sesuai dengan kehidupan masa kini dan masa yang akan

datang, serta mengembangkan prestasi baru yang menjadi karakter baru Bangsa. Oleh karena itu, pendidikan budaya dan karakter Bangsa merupakan inti dari suatu proses pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya dukungan dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat, lingkungan dan pihak penyelenggara pendidikan, dalam hal ini adalah pihak sekolah baik itu pendidik dan peserta didik itu sendiri untuk menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani yaitu kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Pada hakikatnya disusunnya sebuah Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar di setiap jenjang pendidikan di Indonesia adalah untuk menyamaratakan kemampuan kognitif peserta didik. Namun itu bukan berarti mengenyampingkan aspek afektif dan psikomotor. Hanya saja yang lebih ditekankan adalah dominasi aspek kognitif. Standar Kompetensi berguna untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami materi yang diajarkan juga sebagai arahan atau tuntunan bagi guru dalam membawakan materi. Secara lebih terperinci hal itu dapat dilihat dalam Indikator kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dengan melihat Indikator, guru diharapkan bisa memberikan pengajaran yang sesuai dengan aturan baku yang tersedia disertai seni mengajar yang menyenangkan. Akan tetapi seringkali

terjadi kesenjangan antara realitas dan harapan, khususnya untuk Mata Pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn). Mayoritas peserta didik yang ditemui di lapangan hanya sampai pada taraf hafal terhadap materi PKn yang disampaikan oleh gurunya, padahal dalam kompetensi dasar saja siswa sudah dituntut untuk tidak sekedar hafal materi tetapi juga paham. Bahkan lebih jauh lagi dalam Indikator kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mempelajari suatu materi, siswa harus dapat mengaplikasikan materi yang telah didapatnya dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah tugas bersama untuk memperbaiki sistem dan metode mengajar guru serta menumbuhkembangkan antusiasme peserta didik saat belajar agar tidak merasa terpaksa.

Sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan pendidikan yang mengarah pada terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan Dasar Negara Pancasila atau dengan perkataan lain merupakan Pendidikan Pancasila dalam praktek. Secara *konseptual epistemologis*, Pendidikan Pancasila dapat dilihat sebagai suatu *integrated knowledgesystem* (Hartonian, 1996: 22, Winataputra, 2001: 24) yang memiliki misi menumbuhkan potensi peserta didik agar memiliki "*civic intelligence*" dan "*civic participation*" serta "*civic responsibility*" sebagai warga negara Indonesia dalam konteks watak dan peradaban Bangsa Indonesia yang ber-Pancasila (Winataputra, 2001, 2006: 11-13).

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah

1. Bagi Pendidik

Dapat memahami tujuan kompetensi pembelajaran pada anak didik agar proses pembelajaran dapat tersalurkan dengan baik. Dengan adanya penelitian ini diharap pula dapat bermanfaat bagi guru agar dapat mengupayakan penerapan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum kompetensi agar tercapai (*Indikator*) perencanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang sesuai dengan Standar Nasional yang sudah ada.

2. Bagi Pelajar

Dapat meningkatkan keaktifan belajar pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Serta menumbuhkan minat belajar siswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

3. Bagi Fakultas/ Jurusan PKn

Diharapkan manfaat penelitian ini bagi jurusan adalah agar Institusi lembaga jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo kaya akan pengembangan dan penelitiannya tentang teknik-teknik dan penerapan pemahaman sesuai kompetensi pembelajaran yang ada, dan dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi Peneliti

Sebagai media latih berpikir kritis dan memecahkan masalah di lapangan, serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pembelajaran dengan berbasis masalah yang dapat dijadikan bekal dan alternatif



